

## **BAB 1V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Prosedur Pemberian Izin Trayek Angkutan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Izin Trayek Di Kabupaten Tanah Datar:

1. Prosedur pemberian izin trayek angkutan umum di Kabupaten Tanah

Datar yaitu:

- a. Melengkapi semua persyaratan yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja kepada pengusaha atau pemohon izin tersebut, dalam prosedur pengurusan izin berbeda-beda tergantung dengan izin apa yang pemohon ajukan kepada pegawai instansi terkait.
- b. Menyerahkan berkas atau dokumennya kepada instansi perizinan, pengusaha terlebih dahulu telah mengurus Izin IMB, Izin Angkutan.
- c. Pengusaha harus mempunyai minimal 5 armada atau mobil yang akan dijalkannya maka dari itu izin untuk trayek baru akan diterbitkan.
- d. Melengkapi persyaratan lain sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER).

- e. Melibatkan dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, tim teknis Dinas Perhubungan yang bertugas dalam melakukan pengecekan pada kendaraan dan penyimpanan kendaraan untuk pemohon izin trayek baru.
  - f. Jika telah dilakukan pengecekan dan tim teknis menyatakan sudah layak, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DMPMPTSP NAKER) akan mengeluarkan izin.trayek.
  - g. Penyelesaian pengurusan izin 10 hari kerja oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER).
2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Perusahaan angkutan umum dalam pengurusan Izin Trayek di Kabupaten Tanah Datar
- a. Kinerja dalam pemberian izin trayek di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja masih tergolong rendah tidak sesuai dengan peraturan Bupati yang telah di tetapkan.
  - b. Proses dalam penyelesaian pemohon baru bagi pengusaha angkutan umum masih terlalu lama tidak sesuai dengan peraturan Bupati yang telah ditetapkan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha trayek angkutan umum di Kabupaten Tanah Datar yaitu mengajarkan kepada staf atau para petugas lainnya yang kurang memahami kinerja atau pelayanan terhadap peraturan dan prosedur pelayanan, meningkatkan koordinasi yang baik dengan teknis yang terkait sehingga dapat mengatasi masalah teknis yang ditemui dalam pelayanan perizinan meningkatkan kinerja pada saat pelayanan perizinan kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan perizinan dan akan memperjelas secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan perizinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Agar terjalin kerjasama antara DPMPTSP NAKER dalam pelaksanaan izin trayek lebih ditingkatkan untuk memperjelas tugas dan fungsi, masing-masing dinas.
2. Agar pengurusan izin trayek sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang.
3. Agar lebih ditingkatkan kinerja dalam pengurusan izin trayek supaya pemohon izin tidak merasa dirugikan saat proses pengurusan izin.
4. Agar Pemerintah di Kabupaten Tanah Datar lebih mengawasi lagi angkutan-angkutan yang ada di Kabupaten Tanah Datar dengan memberi sanksi.